



RENJANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN**

2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021.

Renja adalah dokumen rencana pembangunan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja ini mencakup kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta menjadi panduan operasional Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.

Demikian disampaikan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021. Semoga bermanfaat dan berjalan sesuai dengan rencana.

Cimahi,

2020

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAH



HARJONO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD	II – 13
TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2019) dan Capaian Renstra SKPD	II – 13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	II – 28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II – 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	II – 36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III– 45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III–45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III –50
3.3. Program dan Kegiatan.....	III –51
BAB IV PENUTUP	VI – 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2023 bahwa Lima Tahun Ketiga Pemerintah Kota Cimahi merupakan tahapan “Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi Dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ”dan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021 bertemakan “Peningkatan daya saing kota melalui pemberdayaan masyarakat yang ditunjang dengan kemantapan infrastruktur”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
- b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- c) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- e) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- f) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j) Kepres No. 50 tahun 1997 tentang Pedoman Umum Perpustakaan
- k) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah;
 - n) Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 44 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Perpustakaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan dokumen dasar bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah merencanakan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi sebagai tahapan untuk mencapai target akhir Renstra untuk Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis Dan Berbudaya tahun 2022,

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi Informasi Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2020)

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2019)

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022, pagu anggaran Belanja yang diharapkan untuk kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 15.951.244.181. Namun dengan adanya skala prioritas dan pertimbangan-pertimbangan lain Pemerintah Kota Cimahi, maka ditetapkan pagu DPA DISKOMINFOASPUS sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

URAIAN	Jumlah (Rp.)	Prosentase (%)
Pagu Anggaran Belanja Rencana Strategis Tahun 2019	15.951.244.181	
Pagu Anggaran Belanja DPA Tahun 2019	8.478.583.308	53,15%

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses membaca masyarakat	% peningkatan pemustaka Kota Cimahi	0,99%	62,7%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	BB	BB	100%

Capaian sasaran strategis meningkatkan akses membaca masyarakat dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi mencapai capaian 100%.

Terdapat 5 urusan dan 1 non urusan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, yang terdiri dari 8 program dan 49 kegiatan. Pencapaian saasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2019 per urusan sebagai berikut :

a. **Urusan Perpustakaan**

Tabel 2.3. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Infomatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019, Urusan Perpustakaan

Eselon	No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	1	Meningkatnya akses membaca masyarakat	% peningkatan pemustaka Kota Cimahi	0,99%	62,7%	100%
III	1	Meningkatkan layanan perpustakaan daerah	Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif	30 Persen	68,5 Persen	100%
	2		Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota	78.7	80,27	100%
IV	1	Operasional perpustakaan umum Kota Cimahi	Jumlah pengunjung perpustakaan umum kota	23.800 Orang	39.305 orang	100%
	2	Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah	Jumlah penambahan sarana dan prasarana perpustakaan umum kota	2 Unit	4 unit	100%
	3	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Jumlah penerima bantuan perpustakaan	10 Paket	10 paket	100%
	4	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah koleksi bahan bacaan perpustakaan kota	23.958 Buah	27.958 buah	100%
	5	Pengembangan sistem layanan perpustakaan	Jumlah dokumen pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan	0 paket	3 paket	100%
	6	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Jumlah koordinasi pengembangan perpustakaan	2 Kali	23 kali	100%
	7	Peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan daerah terlatih	50 Orang	50 orang	100%
	8	Monitoring dan pembinaan perpustakaan umum daerah	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	4 Unit	13 unit	100%
	9	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Jumlah aktivitas berbasis pustaka	3 aktivitas	45 aktivitas	100%
	10	Terlaksananya penyuluhan minat baca kepada masyarakat	Jumlah aktivitas penyuluhan ttg minat baca yang efektif	1 kali	3 kali	100%

b. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Tabel 2.4. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019, Urusan Komunikasi dan Informatika

Eselon	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.6 Indeks	3,16 indeks	100%
III	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah	30 Persen	100 persen	100%
IV	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	60 Persen	90 persen	100%
	Meningkatnya optimalisasi pendayagunaan infrastruktur teknologi informasi	Level Pengoperasian Pusat Data	1 Level	2 level	100%
	Meningkatnya perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan infrastruktur TIK	1 Dokumen	1 dokumen	100%
	Meningkatnya kompetensi SDM bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah peserta pembinaan/rakor TIK	200 Orang	236 orang	100%
	Terfasilitasinya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah peserta lomba IT kreatif dan pelatihan IT Kreatif	125 Orang	163 orang	100%
	Terlaksananya pengkajian dan pengembangan sisitem informasi	Level Integrasi Sistem Aplikasi	1 level	2 Level	100%

c. **Urusan Persandian**

Tabel 2.5. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019, Urusan Persandian

Eselon	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Informasi Yang Aman	1,5 Persen	100 persen	100%
IV	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Prosentase Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi yang telah tertangani	20 Persen	100 persen	100%
	Meningkatnya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	10 Persen	11,11persen	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan	10 Persen	30 persen	100%

	pengamanan informasi pemerintah daerah	persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah			
--	--	--	--	--	--

d. Urusan Statistik

Tabel 2.6. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Infromatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019, Urusan Statistik

Eselon	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	50%	74,07%	100%
III	Meningkatkan pengelolaan data statistik daerah	Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah	35 Persen	36,77 persen	100%
IV	Meningkatnya koordinasi pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	20 Kali	31 kali	100%
	Meningkatnya pembinaan SDM pengelola data/informasi/statistik	Jumlah SDM pengelola data/informasi/statistik terbina	100 Orang	65 orang	100%
	Meningkatnya penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Kota Cimahi	Jumlah publikasi data statistik daerah	2 Kali	3 publikasi	100%

e. Urusan Kearsipan

Tabel 2.7. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Infromatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019, Urusan Kearsipan

Eselon	No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	1	Meningkatnya kinerja kearsipan daerah pada pencipta arsip	Kategori LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	60 Indeks	72,32 Indeks	100%
III	1	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	5 Persen	18,5 Persen	100%
IV	1	Meningkatnya pengelolaan arsip statis	Nilai LAKE aspek Pengelolaan Arsip Statis	1,67 Persen	49,88 Persen	100%
	2	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Nilai LAKE Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan	58,39 Persen	65,79 Persen	100%
	3	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Nilai LAKE aspek Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan	43,16 Persen	90 Persen	100%
	4	Meningkatnya pembinaan kearsipan	Nilai LAKE Aspek Program Kearsipan	56 Persen	66,25 Persen	100%
	5	Meningkatnya pengolahan arsip inaktif	Nilai LAKE Aspek Pengolahan Arsip Inaktif (penyusutan arsip)	0 Persen	27,03 Persen	100%
	6	Meningkatnya pengembangan SDM kearsipan	Nilai LAKE aspek SDM Kearsipan	36,96 Persen	76,09 Persen	100%

f. Non Urusan

Tabel 2.8. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019, Urusan Penunjang

Eselon	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	BB	BB	100%
III	Meningkatkan layanan pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi	75 Persen	100 Persen	100%
	Meningkatkan layanan pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	75 Persen	89,15 Persen	100%
	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	89,97 Persen	100%
	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai LAKIP	75 Indeks	76 Indeks	100%
	Meningkatkan kapasitas aparatur	Persentase ASN Yang Dibina	4 Persen	75,56 Persen	100%
IV	Tersusunnya standar pelayanan operasional dan prosedur PD	Jumlah SOP	10 SOP	40 SOP	100%
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen RENSTRA	0 Dokumen	0 Dokumen	
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen Monev	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Tersusunnya lapaoran keuangan PD	Jumlah Laporan Keungan yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	Prosentase lapran pertanggung jawaban yang sesuai aturan	100%	100%	100%
	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Meningkatnya jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Tersedianya media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Meningkatnya Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan	0 Paket	0 Paket	
	Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan meubeleur kantor	Jumlah kursi	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah lemari	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah meja	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah set partisi	1 Paket	1 Paket	100%
	Meningkatnya pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit komputer	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah unit printer	0 Paket	0 Paket	
		Jumlah unit server	0 Paket	0 Paket	
	Tersedianya gudang	Jumlah gudang	1 Gudang	1 Gudang	100%

	kantor				
	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	1Paket	1 Paket	100%
	Tertatanya arsip daerah di lingkungan dinas	Jumlah arsip aktif dan inaktif	1 Paket	1 Paket	100%
	Tersedianya jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah THL yang diasuransikan	0 Orang	21 Orang	100%
	Terfasilitasinya penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi kedinasan	Prosentase perjalanan dinas yang terakomodir	75 persen	100 persen	100%
	Meningkatnya pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai	Jumlah ASN yang dibina	2 Orang	2 Orang	100%

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Infomatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.9. Realisasi APBD Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pagu Anggaran Tahun 2019	8.260.333.883,00
2	Realisasi Anggaran s.d. Desember 2019	7.414.459.910,00
3	Sisa Anggaran Tahun 2019	84.5873.973,00

Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.10. Realisasi APBD Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	7	8	9
	1.01.01 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	8.260.333.883,00	7.414.459.910,00	89,76
1	05 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.292.023.537	4.903.083.213	92,65
	02 Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1.395.812.092	1.335.975.592	95,71
	04 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	190.256.000	188.226.069	98,93
	06 Kegiatan : Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	223.511.250	218.594.921	97,80
	09 Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah	224.983.095	185.872.656	82,62
	10 Kegiatan: Optimalisasi Pendayagunaan Infrastruktur Teknologi Informasi	545.506.000	467.152.692	85,64
	14 Kegiatan:Perencanaan dan pengembangan kebijakan Infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi	2.203.000	2.203.000	100,00
	15 Kegiatan : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1.360.672.000	1.296.315.538	95,27
	16 Kegiatan : Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	568.059.000	542.184.420	95,45

		17	Kegiatan : Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	200.758.400	117.582.032	58,57
		18	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	263.938.700	255.775.414	96,91
		20	Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	316.324.000	293.200.879	92,69
5	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	418.079.365	320.182.962	76,58
		06	Kegiatan : Koordinasi Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	29.359.400	14.037.100	47,81
		07	Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik Kota Cimahi	365.049.735	295.515.262	80,95
		08	Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola data/informasi/statistik	23.670.230	10.630.600	44,91
6	15		Program Peyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	178.129.000	143.480.497	80,55
		01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	109.756.000	82.035.997	74,74
		02	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	41.260.000	37.620.500	91,18
		03	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	27.113.000	23.824.000	87,87
7	17		Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	464.154.100	426.234.200	91,83
		02	Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah	13.220.000	13.220.000	100,00
		03	Kegiatan: Pengembangan Sistem Layanan Perpustakaan	-	-	0,00
		04	Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	26.965.600	20.390.000	75,61
		05	Kegiatan: Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	108.452.600	107.737.850	99,34
		06	Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	17.000.000	17.000.000	100,00
		07	Kegiatan: Monitoring dan Pembinaan Perpustakaan Umum Daerah	56.661.000	27.261.000	48,11
		08	Kegiatan: Pengembangan Minat dan Budaya Baca	55.152.500	54.932.500	99,60
		09	Kegiatan: Sosialisasi/Penyuluhan tentang Pengembangan Minat Baca	23.000.000	23.000.000	100,00
		10	Kegiatan: Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	163.702.400	162.692.850	99,38
8	18		Program Sistem Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan	713.437.634	610.244.732	85,54
		01	Kegiatan: Penyelenggaraan Pembinaan Kearsipan	92.394.000	67.570.000	73,13
		02	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengolahan Arsip Inaktif	294.975.200	291.342.000	98,77
		03	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Statis	165.826.049	123.744.549	74,62
		04	Kegiatan: Pengembangan SDM Kearsipan	73.831.000	52.989.683	71,77
		05	Kegiatan: Pengembangan Kebijakan Kearsipan	86.222.560	74.432.000	86,33
		06	Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Arsip	188.825	166.500	88,18
1.	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	987.075.317	821.247.471	83%
		01	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.484.750	35.824.100	95,57
		02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	22.020.000	9.564.776	43,44
		03	Kegiatan : Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan	31.560.300	28.155.910	89,21

		04	Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	261.268.765	198.674.519	76,04
		05	Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Meubeler Kantor	77.085.996	53.481.591	69,38
		06	Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	141.008.000	115.423.273	81,86
		07	Kegiatan : Penyediaan Gudang Kantor	43.824.000	40.923.000	93,38
		08	Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.834.000	8.833.900	100,00
		09	Kegiatan : Penataan Arsip Daerah	51.455.000	49.357.238	95,92
		10	Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	-	-	0,00
		11	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	82.524.500	81.081.950	98,25
		12	Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	230.010.006	199.927.214	86,92
2	02		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	148.422.000	144.806.130	97,56
		01	Kegiatan : Penyusunan Standar Pelayanan Operasional dan Prosedur PD	59.000.000	59.000.000	100,00
		02	Kegiatan : Penyusunan Renstra dan Renja PD	3.975.000	3.956.000	99,52
		03	Kegiatan :Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	85.447.000	81.850.130	95,79
3	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.012.930	45.180.705	76,56
	07		Kegiatan : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	59.012.930	45.180.705	76,56

B. Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2020)

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Infomatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.11. Perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019-Tahun 2020

No.	Tahun	Jumlah		
		Urusan	Program	Kegiatan
1	2019	5	8	49
2	2020	5	9	39

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Infomatika, Kearsipan dan Perpustakaan KOTA CIMAHI Tahun 2018-2022, pada tahun 2020 direncanakan anggaran sebesar Rp. 16.685.753.305,00, namun karena keterbatasan anggaran maka mendapatkan alokasi sebesar Rp. 5.104.534.171,00 atau 30,59% dari nilai anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan 5 urusan, 9 program 39 kegiatan.

No.			Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan (output)	Renstra		DPA 2020	
U	P	K			Target	Rp.	Target	Rp.
I			TUJUAN : MENINGKATKAN TINGKAT LITERASI MASYARAKAT	Prosentase pemustaka aktif	0,02 Persen		0,02 Persen	
			SASARAN : MENINGKATKAN AKSES MEMBACA MASYARAKAT					

I.1	1		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	(1)Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif; (2)Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota;	(1)68 Persen (2)78.8	1.879.900.550	(1)68 Persen (2)78.8	397.606.750
I.1.1		1	MONITORING DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	5 Unit	25.555.950	5 Unit	16.500.000
I.1.2		2	OPERASIONAL PERPUSTAKAAN UMUM KOTA CIMAHI	Jumlah pengunjung perpustakaan umum kota	23.850 Orang	169.095.203	23.850 Orang	204.681.750
I.1.3		3	PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koordinasi pengembangan perpustakaan	5 Kali	34.074.600	0 Kali	0
I.1.4		4	PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	Jumlah aktivitas berbasis pustaka	3 Aktivitas	63.889.875	3 Aktivitas	43.075.000
I.1.5		5	PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN	Jumlah dokumen pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan	1 paket	42.593.250	0 paket	0
I.1.6		6	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN	Jumlah pengelola perpustakaan daerah terlatih	50 Orang	85.186.500	0 Orang	0
I.1.7		7	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah koleksi bahan bacaan perpustakaan kota	24958 Buah	214.669.980	24958 Buah	53.350.000
I.1.8		8	PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	Jumlah penerima bantuan perpustakaan	5 Paket	63.889.875	5 Paket	80.000.000
I.1.9		9	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	Jumlah penambahan sarana dan prasarana perpustakaan umum kota	2 Unit	60.847.500	0 Unit	0
I.1.10		10	SOSIALISASI/PENYULUHAN TENTANG PENGEMBANGAN MINAT BACA	Jumlah aktivitas penyuluhan ttg minat baca yang efektif	1 Kali	85.186.500	0 Kali	0
II			TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH	SAKIP	BB		BB	
			SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH					
II.1	2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase ASN Yang Dibina	100 Persen	660.000.000	100 Persen	5.700.000
II.1.1		11	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Jumlah ASN yang dibina	45 Orang	660.000.000	45 Orang	5.700.000
II.2.	3		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP	79 Indeks	1.387.500.000	79 Indeks	79.029.400
II.2.1		12	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Penyusunan Laporan Inventaris Barang	1 Dokumen	27.500.000	0 Dokumen	0
II.2.2		13	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	12 Dokumen		12 Dokumen	0

II.2.3	14	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen LKIP	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	32.254.400
			Jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen		1 Dokumen	
			Jumlah dokumen monev	12 Dokumen		12 Dokumen	
II.2.4	15	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	46.775.000
			Jumlah Dokumen Renstra	0 Dokumen		0 Dokumen	
II.2.5	16	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	jumlah SOP	10 SOP	357.500.000	0 SOP	
II.3.	4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi	100 Persen	2.441.884.900	100 Persen	544.267.796
II.3.1	17	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan dinas	100 Persen	189.094.400	100 Persen	91.936.017
II.3.2	18	PENATAAN ARSIP DAERAH	jumlah arsip aktif dan inaktif	1 Paket	86.000.000	1 Paket	36.450.000
II.3.3	19	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah pengadaan kendaraan	1 Paket	797.365.000	1 Paket	96.515.931
II.3.4	20	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah kursi	1 Paket	61.494.000	1 Paket	45.750.000
			jumlah lemari	1 Paket		1 Paket	
			jumlah meja	1 Paket		1 Paket	
			jumlah set partisi	1 Paket		1 Paket	
II.3.5	21	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit komputer	1 Paket	232.495.000	1 Paket	32.905.000
			jumlah unit printer	1 Paket		1 Paket	
			jumlah unit server	1 Paket		1 Paket	
II.3.6	22	PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	jumlah set seragam pegawai	45 Set	50.000.000	0 Set	0
II.3.7	23	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	56.700.000	12 Bulan	41.131.114
II.3.8	24	PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	1 Gudang	35.000.000	1 Gudang	45.923.000
II.3.9	25	PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	jumlah THL yang diasuransikan	25 Orang	15.000.000	25 Orang	43.988.246
II.3.10	26	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	jumlah bulan jasa komunikasi	12 Bulan	57.540.000	12 Bulan	27.342.038
II.3.11	27	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	158.724.500	12 Bulan	27.889.950
II.3.12	28	PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan penyediaan media informasi	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	5.953.000
II.3.13	29	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	jumlah set peralatan rumah tangga	1 Paket	9.000.000	0 Paket	0
III		TUJUAN : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH	Kategori LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	65 Indeks		65 Indeks	
		SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA KEARSIPAN DAERAH PADA PENCIPTA ARSIP					

III.1.	5		PROGRAM SISTEM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEARSIPAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	15 Persen	1.626.867.312	15 Persen	308.681.250
III.1.1		30	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	Nilai LAKE Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan	71 Persen	121.867.312	71 Persen	93.791.250
III.1.2		31	PENGEMBANGAN KEBUJAKAN KEARSIPAN	Nilai LAKE aspek Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan	81 Persen	150.000.000	81 Persen	13.800.000
III.1.3		32	PENGEMBANGAN SDM KEARSIPAN	Nilai LAKE aspek SDM Kearsipan	71 Persen	100.000.000	71 Persen	10.250.000
III.1.4		33	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KEARSIPAN	Nilai LAKE Aspek Program Kearsipan	66 Persen	250.000.000	66 Persen	0
III.1.5		34	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS	Nilai LAKE aspek Pengelolaan Arsip Statis	71 Persen	475.000.000	71 Persen	40.840.000
III.1.6		35	PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN ARSIP INAKTIF	Nilai LAKE Aspek Pengolahan Arsip Inaktif	71 Persen	530.000.000	71 Persen	150.000.000
IV			TUJUAN : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.5 Indeks		3.5 Indeks	
			SASARAN : MENINGKATNYA TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK					
IV.1.	6		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah	40 Persen	8.307.273.471	50 Persen	3.643.678.975
IV.1.1		36	OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	Level Pengoperasian Pusat Data	2 Level	860.910.000		1.456.415.000
				Prosentase cakupan layanan TIK				
IV.1.2		37	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	91 Persen	1.656.200.000	83 Persen	382.226.500
IV.1.3		38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Jumlah peserta lomba IT kreatif dan pelatihan IT Kreatif	150 Orang	240.149.000	0 Orang	175.000
IV.1.4		39	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Jumlah peserta pembinaan/rakor TIK	150 Orang	248.430.000	0 Orang	1.826.000
IV.1.5		40	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	prosentase dokumen analisis berita media cetak/media penyiaran/media on line	100 Persen	334.113.202	100 Persen	47.055.000
IV.1.6		41	PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	Jumlah aplikasi terintegrasi		662.480.000		166.325.000
				Level Integrasi Sistem Aplikasi	2 Level		2 Level	
IV.1.7		42	PENINGKATAN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN	Level Pelayanan Pengaduan Publik	2 Level	330.151.455	2 Level	137.835.515

			INFORMASI DAERAH					
				Prosentase pengaduan masyarakat dan permintaan informasi yang ditindaklanjuti				
IV.1.8		43	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah berita/artikel/publikasi pembangunan daerah melalui media massa	4815 Artikel	806.741.391	4815 Artikel	707.531.960
IV.1.9		44	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah iklan/diplay/naskah release/talkshow/siaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah	960 Kali	799.142.847	960 Kali	687.289.000
IV.1.10		45	PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT	Jumlah informasi yang bersifat penyuluhan	124 Informasi	191.369.696	124 Informasi	57.000.000
IV.1.11		46	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan infrastruktur TIK	2 Dokumen	124.044.425	2 Dokumen	0
IV.1.12		47	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Jumlah dokumen kebijakan Komunikasi dan informasi	0 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0
				level Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2 Level		2 Level	
IV.2.	7		PROGRAM PEYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Yang Aman;	2 Persen	637.610.541	2 Persen	40.380.000
IV.2.1		48	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Prosentase Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi yang telah tertangani	100 Persen	405.392.000	100 Persen	27.290.000
IV.2.2		49	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KOTA	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	60 Persen	89.322.541	0 Persen	0
IV.2.3		50	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah daerah	60 Persen	142.896.000	60 Persen	13.090.000
V			TUJUAN : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	75 Persen		75 Persen	
			SASARAN : MENINGKATNYA TATA KELOLA STATISTIK SEKTORAL DAERAH					
V.1.	8		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah	50 Persen	757.610.925	50 Persen	85.190.000

V.1.1	51	KOORDINASI PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	20 Kali	118.385.925	20 Kali	9.940.000
V.1.2	52	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PENGELOLA DATA/INFORMASI/STATISTIK	Jumlah SDM pengelola data/informasi/statistik terbina	100 Orang	118.375.000	100 Orang	0
V.1.3	53	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK KOTA CIMAHI	Jumlah publikasi data statistik daerah	4 Kali	520.850.000	4 Kali	75.250.000
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2020					16.685.753.305		5.104.534.171

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi melaksanakan 5 urusan yang menjadi kewenangan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, Urusan Statistik, Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

- a. Layanan Publik Secara Langsung

Terdiri dari : Layanan Perpustakaan, Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Informasi, Layanan Publikasi
- b. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

Terdiri dari : Layanan Data Statistik, Layanan Publikasi, Layanan Dokumentasi, Layanan Aplikasi TIK, Layanan Infrastruktur Jaringan TIK, Layanan Persandian, Layanan Kearsipan Daerah

Kinerja masing-masing layanan tersebut didukung oleh beberapa aspek kinerja, sehingga untuk mengevaluasi kinerja layanan tersebut dilakukan analisa terhadap capaian indicator masing-masing aspeknya. Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut:

- A. Layanan Publik Secara Langsung
 - a. Layanan Perpustakaan

Layanan Perpustakaan meliputi Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi, Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Pembinaan Perpustakaan dan Layanan Peningkatan Gemar Membaca. Secara umum Layanan Perpustakaan dalam kondisi yang cukup baik ditinjau dari Indeks Kepuasan Konsumen, namun kurang didukung oleh beberapa kondisi, sebagai berikut:

 - Gedung Perpustakaan yang ada tidak sesuai dengan standar Perpustakaan Kota/Kabupaten
 - Struktur organisasi Bidang Perpustakaan kurang sesuai dengan Petunjuk Teknis Perpustakaan RI sehingga terdapat tupoksi yang belum dapat dilaksanakan secara optimal
 - Pembinaan terhadap perpustakaan belum dilaksanakan secara optimal sehingga kondisi terutama perpustakaan-perpustakaan sekolah dan sudut-sudut baca

belum dapat dipetakan

4. CRH baru dilaksanakan pada tingkat SD, belum ada pengembangan ke tingkat SMP dan masyarakat
5. Administrasi untuk perpustakaan keliling belum mencatat pemustaka perpustakaan keliling
6. Sosialisasi e-Lib belum dilakukan secara optimal sehingga keberadaan E-Lib juga tidak diketahui oleh pemustaka
7. Lokasi SD di Kota Cimahi tidak semuanya berada di jalan yang cukup besar sehingga pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling tidak mampu mencapai lokasinya

b. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi PESDUK (Pesan Penduduk), layanan surat baik elektronik maupun fisik, pengaduan langsung dan pengaduan melalui media massa. Secara umum layanan Pengaduan Masyarakat cukup baik karena hampir semua pengaduan selalu direspon oleh pengelola. Namun kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah pada tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu tidak terkontrolnya penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu layanan Pengaduan Masyarakat belum terintegrasi dengan instansi / lembaga Pemerintah instansi vertikal antara lain kepolisian, BPN, Kementerian Agama, BPS.

c. Layanan Informasi

Layanan Informasi, secara fisik telah mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya renovasi loket pelayanan. Layanan ini didukung oleh Tim PPID Kota Cimahi yang terdiri dari PPID Utama yaitu Kepala Bidang IKPS Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah :

1. Belum adanya SOP untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada PPID Kota Cimahi
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah.
3. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Cimahi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
4. Informasi pada website Pemerintah Kota Cimahi kurang terupdate

d. Layanan Publikasi

Layanan Publikasi dilaksanakan melalui media sosial dan kerjasama dengan media massa. Layanan publikasi melalui media sosial terdapat 2 yaitu facebook dan instagram. Publikasi melalui media sosial meliputi publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, capaian-capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta program-program prioritas. Sedangkan publikasi melalui media massa meliputi berbagai media koran/majalah, media online, media radio dan media televisi. Publikasi melalui media massa meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi. Pers release dilakukan untuk program-program prioritas Pemerintah Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi dalam layanan publikasi, sebagai berikut :

1. Publikasi melalui media sosial mempunyai kecenderungan terfokus pada aktivitas Kepala Daerah dan kurang didukung oleh narasi tentang pembangunan.
2. Publikasi melalui media sosial kurang mendapat respon dari masyarakat karena kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah yaitu respon dari masyarakat tidak diberikan tanggapan karena tidak didukung dengan tim melainkan hanya dilaksanakan oleh operator.
3. Tidak ada feedback dari analisis berita yang dilakukan sebagai bahan ppenyusunan perencanaan publikasi.

B. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

a. Layanan Data Statistik

Untuk Layanan Data Statistik, pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi OPEN DATA sebagai sarana publikasi data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam layanan Data Statistik adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral antara “Bappeda dengan Diskominfo;
2. Pengelola Data pada PD dibebani pekerjaan pengumpulan data dari berbagai instansi (Bappeda, Setda, Kominfo, Instansi Vertikal) sehingga tidak focus;
3. Pemahaman tentang statistik sektoral masih rendah dan masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistik, kemampuan analisis dan grafis;
4. Penggunaan Platform yang berbeda pada aplikasi yang dibangun perangkat daerah sehingga menghambat proses integrasi.

b. Layanan Dokumentasi

Layanan Dokumentasi dilakukan hanya kegiatan pimpinan kepala daerah.

c. Layanan Aplikasi TIK

Layanan Aplikasi TIK meliputi layanan domain dan subdomain, pengelolaan /kontrol aplikasi-aplikasi PD, pendampingan pembangunan aplikasi PD dan integrasi aplikasi-aplikasi PD.

d. Layanan Infrastruktur Jaringan TIK

Seluruh Perangkat Daerah di lingkup perkantoran Pemkot Cimahi telah tersambung dengan sambungan intranet. Sedangkan yang di luar lingkup perkantoran Pemkot Cimahi menggunakan jaringan Fiber Optik. Belum seluruhnya kantor layanan tersambung dengan fiber optic melainkan menggunakan saluran VPN. Kendala dalam layanan infrastruktur jaringan TIK yaitu :

1. PUSAT DATA/ DATA CENTRE belum memadai dan bercampur dengan ruang kerja administrasi.
2. Penggelaran Jaringan Fiber Optik belum menyeluruh sesuai dengan perencanaan
3. Implementasi dan Optimalisasi Jaringan CCTV untuk kepentingan implementasi Smart City belum dilakukan

4. Belum lengkapnya perangkat pendukung kinerja jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta perangkat pengamanan jaringan di dalamnya.
 5. Adanya ancaman akan keamanan jaringan yang terus meningkat yang harus segera diantisipasi segera.
 6. Belum tersediannya kebijakan, standard dan prosedur
- e. Layanan Persandian
- Layanan persandian meliputi layanan keamanan informasi, sertifikasi elektronik dan layanan persandian. Kendala yang dihadapi dalam layanan persandian adalah :
1. Kategori Sistem Elektronik tinggi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi membutuhkan minimal tingkat kematangan tata kelola yang Terdefinisi dan Konsisten (tingkat III) dengan kelengkapan control keamanan yang cukup lengkap. Mengacu pada hasil penilaian mandiri dengan menggunakan instrument Indeks KAMI, tingkat kematangan tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi baru ditingkat Penerapan Kerangka Kerja Dasar (tingkat II) dengan kelengkapan control keamanan yang perlu perbaiki
 2. Belum adanya dokumen perencanaan strategis persandian dan keamanan informasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan program/ kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi
 3. Belum ada proses penilaian kinerja keamanan informasi untuk mengukur tingkat ketercapaiannya terhadap sasaran keamanan informasi
 4. Kebijakan tata kelola keamanan informasi sudah ada, namun masih belum disesuaikan dengan regulasi maupun standar yang terbaru
 5. SOP keamanan informasi yang ada saat ini belum memenuhi semua kebutuhan organisasi, dan masih mengacu pada regulasi maupun standar lama
 6. Kurang optimalnya layanan persandian dan keamanan informasi karena belum tersediannya sarana dan prasarana pendukung
 7. Security), Keamanan Aplikasi yang telah dibangun, Keamanan Akses Jaringan Internet maupun Intranet dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi disetiap SKPD;
- f. Layanan Kearsipan Daerah
- Layanan Kearsipan belum dapat dilakukan sesuai standar. Kendala-kendala yang dihadapi dalam layanan kearsipan, sebagai berikut :
1. Pejabat struktural pada LKD tidak berlatarbelakang pendidikan kearsipan dan belum pernah mengikuti pelatihan kearsipan
 2. Belum adanya nomenklatur pranata arsip pada Perangkat Daerah
 3. Belum adanya Arsiparis pada LKD Kota Cimahi
 4. Belum ada DEPOT ARSIP pada LKD
 5. Pada Perangkat Daerah / Pencipta Arsip tidak terdapat ruangan khusus untuk penyimpanan arsip
 6. Tata Naskah Dinas: harus disempurnakan tentang jenis dan format naskah dinas, serta penggandaan naskah dinas keluar. Agar ditetapkan oleh Wali Kota Cimahi
 7. Klasifikasi Arsip: Belum ditetapkan Tim penyusun Revisi Klasifikasi Arsip dengan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi
 8. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis: Belum ditetapkan kebijakannya, berdasarkan Perka ANRI nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

9. Jadwal Retensi Arsip: Dari 54 urusan Pemerintah Kota Cimahi, JRA substantif yang telah ditetapkan sebanyak 6 urusan atau 11,11%. LKD belum menyelesaikan penyempurnaan rancangan revisi terhadap kebijakan yang memuat ketentuan mengenai jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif (kepegawaian).
10. Pedoman Penyusutan Arsip: Perwal Kota Cimahi nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Kota Cimahi belum memuat ketentuan mengenai prosedur pemusnahan arsip berupa pembentukan panitia penilai arsip dan penetapan arsip yang akan dimusnahkan
11. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital/ Program Arsip Vital: Belum ditetapkan
12. Belum adanya SOP Pengelolaan Kearsipan Kota Cimahi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen

SDM, manajemen resiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

b. Portal Satu Data Indonesia

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan :

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

c. Command Centre

Dalam rangka “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” Provinsi Jawa Barat akan membangun Command Centre untuk seluruh Kota/Kabupaten Jawa Barat dalam waktu 5 tahun, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Pemberian bantuan diberikan secara bertahap tergantung pada kesiapan kota / kabupaten. Command Center (Smart Digital Government Di Kabupaten/Kota), akan berfungsi sebagai sarana Monitoring Kinerja Perangkat daerah, Monitoring Laporan Lapangan secara real time, Penyajian Informasi Eksekutif, Video Conference, dan Presentasi.

d. Pembangunan Mall Pelayanan Publik

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2020 menyatakan bahwa tema pembangunan Tahun 2020 adalah

“Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan didukung Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2020 :

- Prioritas 1 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- Prioritas 2 : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- Prioritas 3 : Peningkatan Penanganan PMKS
- Prioritas 4 : Peningkatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi
- Prioritas 5 : Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019
- Prioritas 6 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- Prioritas 7 : Peningkatan Produktivitas Pelaku Ekonomi Rakyat
- Prioritas 8 : Peningkatan RTH dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Prioritas 9 : Penanganan Banjir dan peningkatan kesiapsiagaan tanggap bencana
- Prioritas 10 : Penataan Kawasan Kumuh
- Prioritas 11 : Pengembangan Jaringan Jalan dan Manajemen Transportasi

Sesuai dengan tugas dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Kearsipan, urusan Perpustakaan, urusan Persandian dan urusan Statistik maka secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian prioritas 2 yaitu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui layanan perpustakaan dan prioritas 4 yaitu peningkatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yakni melalui layanan pengaduan masyarakat, layanan informasi, publikasi pembangunan dan pemerintahan, layanan penyelenggaraan elektronik government, layanan pengelolaan data statistik serta layanan pengelolaan kearsipan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kota Cimahi Tahun 2020, secara umum masyarakat Kota Cimahi mengharapkan pelatihan TIK. Sedangkan dari hasil Forum Perangkat Daerah yang melibatkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan-urusan dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi bahwa masyarakat Kota Cimahi pada hakekatnya mengharapkan peningkatan kinerja semua urusan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Infrastruktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Pembangunan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Visi ,Misi dan Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang mengarah padaVisi, Misi, tujuan dan sasaran yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam RENSTRA DISKOMINFOARPUS Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah

Terwujudnya Pusat Layanan Informasi, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, Kearsipan Dan Pustaka Daerah Untuk Mencapai Kota, Pemerintahan Dan Masyarakat Cimahi Yang Smart

Misi, tujuan, sasaran dan target indikator utama (IKU) Tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi adalah :

Tabel 3.1. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja DISKOMINFOARPUS Tahun 2021

No.	Misi Kota Cimahi	Misi DISKOMINF OARPUS Kota Cimahi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
					Uraian	Target
I	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul	Mewujudkan Perpustakaan sebagai akses bagi peningkatan kapasitas masyarakat	Meningkatkan tingkat literasi Masyarakat	Meningkatkan akses membaca masyarakat yang dilihat dengan indicator prosentase pemustaka aktif	Prosentase peningkatan pemustaka aktif	1,06
II	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang <i>pro public</i>	Mewujudkan pengelolaan arsip daerah yang baik sebagai tolok ukur / cermin tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan sumber pengetahuan	Meningkatkan penyelenggaraa n kearsipan daerah	Meningkatnya kinerja kearsipan daerah pada pencipta arsip	Indeks LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	72,32
		Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan penyelenggaraa n e-government	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,18
		(good-government) melalui	Meningkatkan penyelenggaraa n statistic sektoral daerah	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah	80

No.	Misi Kota Cimahi	Misi DISKOMINF OARPUS Kota Cimahi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
					Uraian	Target
		peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik, e-government, statistic dan pengamanan persandian			melakukan integrasi data statistik sektoral	

3.3. Program dan Kegiatan

Terkait dengan perubahan nomenklatur program, terdapat pula perubahan nomenklatur kegiatan. Dengan demikian, program dan kegiatan DISKOMINFOARPUS Tahun Anggaran 2021, sebagaimana pada Tabel 3.3. terdiri dari 8 program, 53 kegiatan.

Tabel 3.3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 Berdasarkan Rencana Startegis Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022

RENCANA KERJA TAHUN 2021
Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	13.493.034.317		
	I	Urusan	PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP		
	I.1	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai LAKIP	85 indeks	8.294.738.317
A	I.1.1	Kegiatan	Administrasi Keuangan	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	100 persen	7.683.481.617
				Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	21 Dokumen	
1	I.1.1.2	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan;	48 Pegawai	7.635.966.617
		Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan non ASN yang terfasilitasi administrasi	61 pegawai	
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan verikasi keuangan	12 bulan	47.515.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi	12 bulan	
3	I.1.1.4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun;	1 dokumen	
		Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	
2	I.1.1.3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 dokumen	
		Sub Kegiatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan prognosis	1 Dokumen	
B	I.1.2	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	75 persen	27.222.000
				Jumlah penambahan barang yang diadministrasikan		
		Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pengamanan	6 unit	27.222.000
B	I.1.2	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan administrasi umum	50 persen	325.356.500
				Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	12 Bulan	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
14	I.1.2.11	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor;	12 Bulan	26.230.200
15	I.1.2.12	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan;	12 Bulan	11.964.300
23	I.1.2.20	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;	2 Set	32.137.000
25	I.1.2.22	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	76 aktivitas	255.025.000
		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50 persen	100.868.100
				Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	
	I.1.2.17	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan;	39.660.000
	I.1.2.15	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan;	13.970.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	I.1.2.14	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan perlengkapan kebersihan dan jasa tenaga kebersihan	12 bulan	
				jumlah bulan penyediaan umum kantor	12 bulan	47.238.100
		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	50 persen	130.490.100
				Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	6 unit	62.154.100
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya		46.836.000
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	19 unit	21.500.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C	I.1.3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	48 Pegawai;	4.200.000
	I.1.3.6	Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	48 Pegawai;	4.200.000
D	I.1.4	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100 persen	23.120.000
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	12 Dokumen;	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 dokumen	13.120.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 kali	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 kali	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 kali	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 kali	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 dokumen	10.000.000
	III	Urusan	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.304.014.600
	III.1	Program	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;	50 Persen;	1.635.040.000
	III.1.1	Kegiatan	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan layanan TIK;	50 Persen;	401.050.000
	III.1.1.1	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan TIK;	1 Dokumen;	
	III.1.1.2	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Level Pengoperasian Pusat Data;	2 Level;	166.000.000
	III.1.1.4	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase aplikasi yang dikelola	80 Persen	190.500.000
		Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas	3 aktivitas	44.550.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	III.1.2	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	86 Persen	1.233.990.000
	III.1.2.1	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	86 Persen	1.233.990.000
	III.2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Informasi dan komunikasi Pembangunan Daerah	60 Persen	2.668.974.600
	III.2.1	Kegiatan	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan informasi dan komunikasi yang ditindaklanjuti	80 persen	2.668.974.600
				Prosentase permohonan informasi yang dipenuhi	100 persen	
	III.2.1.1	Sub Kegiatan	Layanan Hubungan Media	Jumlah publikasi pemerintahan	4910 publikasi	2.223.970.000
	III.2.1.2	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	50 persen	145.800.000
	III.2.1.3	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	prosentase analisis berita	50 persen	299.204.600
	V	Urusan	PERSANDIAN			100.438.200

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	V.1		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Yang Aman	3 Persen	100.438.200
	V.1.1	Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	50 Persen	42.138.200
	V.1.1.1	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi	8 Perangkat Daerah	42.138.200
	V.1.2	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMKI	25 Persen	58.300.000
				Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan;	50 persen	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	V.1.2.1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	7 Perangkat Daerah	30.800.000
	V.1.2.2	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kemanan informasi yang dilakukan	4 Layanan	27.500.000
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	II	Urusan	KEARSIPAN			191.969.600
	II.1.	Program	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	15 Persen;	162.869.600
E	II.1.1	Kegiatan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKE Aspek Pengolahan Arsip Inaktif;	81 Persen;	11.946.400
36	II.1.2.1	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pendampingan pengelolaan arsip dinamis	1 aktivitas	11.946.400
	II.1.2	Kegiatan	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKE aspek Pengelolaan Arsip Statis;	49,88 Persen;	141.625.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	II.1.2.1	Sub Kegiatan	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyerahan arsip statis	1 PD	141.625.000
F	II.1.3	Kegiatan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai LAKE Program Kearsipan	66,25 persen	9.298.200
				Nilai LAKE aspek Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;(2).Nilai LAKE Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan;(3).Nilai LAKE Aspek Program Kearsipan;(4).Nilai LAKE aspek SDM Kearsipan;	90 Persen;(2).65,79 Persen;(3).66,25 Persen;(4).76,09 Persen;	
38	II.1.3.1	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan kearsipan	1 kali	9.298.200
		Program	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100 persen	9.700.000
		kegiatan	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Prosentase Permohonan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dilayani	100 persen	9.700.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
		sub kegiatan	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Perangkat Daerah yang Bersifat Tertutup berdasarkan pedoman dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)	3 daftar	9.700.000
		Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 persen	19.400.000
		kegiatan	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 persen	19.400.000
		sub kegiatan	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip	3 Perangkat Daerah	19.400.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	IV	Urusan	PERPUSTAKAAN			335.844.800
	IV.1		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif;	30 persen	335.844.800
				Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota	78.8 Angka	
	IV.1.1	Kegiatan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas berbasis pustaka;	3 Aktivitas;	53.231.000
	IV.1.1.1	Sub Kegiatan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah aktivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	1 aktivitas	38.031.000
	IV.1.1.2	Sub Kegiatan	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan gemar membaca ;	1 Aktivitas;	15.200.000
	IV.1.2	Kegiatan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Cimahi;	24000 PENGUNJUNG;	282.613.800
	IV.1.2.1	Sub Kegiatan	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan Kota Cimahi yang dilakukan pembinaan	5 perpustakaan	10.600.000
	IV.1.2.2	Sub Kegiatan	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan Kota Cimahi	3 layanan	253.213.800

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	IV.1.2.3	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan Kota Cimahi yang telah dilakukan pembinaan	50 PENGELOLA	18.800.000
	VI	Urusan	STATISTIK			266.028.800
	VI.1		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Daerah;	65 Persen;	266.028.800
	VI.1.1	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;	2 PUBLIKASI;	266.028.800
				Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi;	200 dataset	
	VI.1.1.1	Sub Kegiatan	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	2 kali	266.028.800
	VI.1.1.2	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM pengelola data/statistik/informasi;	60 Orang;	

BAB IV

P E N U T U P

RencanaKerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun 2018-2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Cimahi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan DISKOMINFOARPUS Kota Cimahi tahun 2021, terutama dalam rencana pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan asumsi penyediaan dana sesuai dengan yang diperkirakan. Rencana target kinerja dan anggaran belum mempertimbangkan aspek ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.